DAFTAR PUSTAKA

Djaenuri, Aries (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Indonesia Ghalia.

Fauzan. M, Moh. Didik Ardiyanto. 2012. Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kota Semarang. Diponegoro *Journal Of Accounting*. 1(2), 1-11.

Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Kobandaha. R, Heince R. N. Wokas. 2016. Analisa Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadpa Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. 4(1): 1461-1472.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta; Erlangga.

Marcelina. K. 2016. *Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang*[Skripsi]. Padang(ID): Universitas Andalas.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Puspita. DA. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*. 3(1).

Rambitan. RR, Inggriani Elim, Sony Pangerapan. 2018. Analisis Pemungutan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi*. 13(2), 649-658.

Rumengan. J, Herman Karamoy, Rudy Pusung. 2015. Efektivitas Pajak Pengambilan dan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. 3(4), 519-619.

Siahaan, Marihot P, S.E. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Simanjuntak, Bungaran Antonius(editor). 2013. *Dampak Otonomi Daerah Indonesia; Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tmbook. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat.